

**KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI SEKITAR DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU (KIK)
KOTA BALIKPAPAN**

**THE ECONOMIC SOCIAL CONDITION OF SOCIETY AROUND THE
PLAN DEVELOPMENT AREA OF KARIANGAU INDUSTRIAL AREA
(KIK) BALIKPAPAN**

By

WARMAN

ABSTRAC

Plan development of Kariangau industrial area in district of west Balikpapan, besides positive also negative affecting to the condition of economic social society environment. For the minimal of the negative impact require to be studied with a purpose to get actual data about the economic social of society condition, and to obtain the picture about social dynamics of society economics in the area around the development activity of KIK, utilize management of possibility incidence of the impact.

The result of research is indicate that mean mount income per capita is good enough, that is Rp. 2.602.596/capita/year, small partly from them have saving, and generally have double job like gardening, growing crops, builder, sell water transportation service, do another job, tukang pijit, tukang ojek, and chicken livestock. Farm status mastered generally do not accompany by any bill of evidence, but there is also some of small which have owned property certificate and situation picture (GS) from Camat (sub-regency chief). Natural resources are exploiting to build house, as a transportation and source of income. The area of the Kariangau industrial area plans, which has wide about 1.603,28 ha, are compose of work-on government land about 987,04 ha and free government land about 616,24 ha.

Keyword: The condition of cultural and economic social.

ABSTRAC

Rencana pembangunan Kawasan Industri Kariangau di Kecamatan Balikpapan Barat, selain berdampak positif juga berdampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Untuk meminimasi dampak negatif tersebut perlu dilakukan studi dengan tujuan mendapatkan data aktual tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan untuk memperoleh gambaran tentang dinamika sosial

ekonomi masyarakat di daerah sekitar kegiatan pembangunan KIK, guna pengelolaan kemungkinan timbulnya dampak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendapatan perkapita cukup baik yaitu Rp. 2.602.596/kapita/tahun, sebagian kecil dari mereka mempunyai tabungan, dan pada umumnya mempunyai pola nafkah ganda, seperti berkebun, berladang, tukang bangunan, jual jasa transportasi air, bekerja serabutan, tukang pijit, tukang ojek, dan ternak ayam. Status lahan yang dikuasai pada umumnya tidak disertai surat bukti apapun, tetapi ada juga sebagian kecil yang sudah memiliki sertifikat hak milik dan gambar situasi (GS) dari camat. Sumberdaya alam dimanfaatkan untuk mendirikan rumah, sebagai sarana transportasi dan sumber mencari nafkah. Lahan pada rencana Kawasan Industri Kariangau seluas 1.603,28 Ha terdiri dari tanah negara garapan seluas 987,04 Ha dan tanah negara bebas 616,24 Ha

Kata Kunci : Kondisi Sosial ekonomi dan budaya

I. PENDAHULUAN

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menuju kota industri, perdagangan dan jasa, program pemerintah Kota Balikpapan diarahkan kepada upaya-upaya menggali dan menangkap peluang investasi dari dalam dan luar negeri, guna berkembangnya industri manufaktur di luar industri pengilangan minyak, industri menengah dan industri kecil.

Rencana pembangunan Kawasan Industri Kariangau (KIK) yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Balikpapan Barat, seluas 1.500 ha, diperkirakan akan menimbulkan dampak positif, antara lain : (1) Terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. (2) Terbukannya peluang usaha baru serta adanya *multiplier effect* ekonomi secara lokal maupun regional. (3) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (4) Pengembangan wilayah yang secara tidak langsung akan membawa kemajuan bagi masyarakat Kota Balikpapan atau bahkan lebih luas lagi masyarakat Kaltim.

Selain menimbulkan dampak positif, rencana kegiatan pembangunan KIK diperkirakan juga akan dapat menimbulkan dampak negatif yaitu : (1) Kegiatan pembebasan lahan untuk KIK seluas 1.500 Ha diperkirakan akan menimbulkan

dampak negatif terhadap mata pencaharian dan pendapatan penduduk yang terkena pembebasan lahan. (2) Aktivitas tenaga kerja pada tahap konstruksi selain menimbulkan dampak positif juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial, ekonomi dan budaya. (3) Rencana kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak terhadap air sungai yang ada di sekitar KIK dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak lanjutan terhadap kehidupan nelayan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1997 telah ditetapkan bahwa dampak negatif dari suatu proyek yang direncanakan harus diminimasi sekecil mungkin, agar kegiatan pembangunan tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan kualitas lingkungan hidup di sekitar proyek yang direncanakan tidak menurun. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dengan tujuan : (1) untuk mendapatkan data yang tepat tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar kegiatan pembangunan Kawasan Industri Kariangau (KIK). (2) untuk memperoleh gambaran dan perspektif dinamika sosial ekonomi masyarakat di Daerah sekitar kegiatan pembangunan Kawasan Industri Kariangau (KIK), dalam upaya pengelolaan kemungkinan timbulnya dampak.

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah setempat dan pihak pemrakarsa, guna meminimasi dampak negatif yang diakibatkan kegiatan proyek.

II. Metode Penelitian

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan, yaitu Kepala Desa, Guru atau pendidik lainnya, Ketua Adat, Tokoh Agama, Kelompok tani, Kelompok Nelayan Ketua RT dan tokoh lainnya yang relevan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak pemrakarsa dan instansi-instansi lain yang terkait seperti Kantor Lurah, Kecamatan, Dinas PU, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Bappeda, Biro Pusat Statistik dan lain-lain.

Parameter yang dikaji dari komponen ekonomi adalah : (1) ekonomi rumah tangga dan masyarakat/wilayah, yang meliputi tingkat pendapatan, kebiasaan

menabung, pola nafkah ganda, serta kesempatan kerja dan berusaha, serta (2) ekonomi sumberdaya alam, yang meliputi pola pemilikan dan pemanfaatan sumberdaya alam,. Data parameter ini selain data sekunder juga terdiri dari data primer yang merupakan hasil survei sampel/wawancara dengan responden sebanyak 30% dari jumlah kepala keluarga yang ditetapkan berdasarkan strata yang ada dalam masyarakat. Lokasi survei adalah daerah-daerah yang diperkirakan akan mendapatkan dampak negatif maupun dampak positif dari proyek.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1). Ekonomi Rumah-Tangga

Pada level ekonomi rumah tangga berdasarkan data hasil survei sampel dapat diketahui rata-rata tingkat pendapatan per bulan/rumah-tangga dilihat dari sisi penerimaan adalah Rp. 1.084.415,- atau Rp. 2 602 596,-/kapita/tahun, suatu tingkat pendapatan yang tinggi menurut kriteria Sayogyo (1977), karena setara dengan 743,60 kg. beras. Pendapatan terendah adalah Rp. 150.000,- (pendapatan seorang petani) dan tertinggi Rp. 11.090.000,- (pendapatan seorang pegawai perusahaan swasta/buruh industri yang dibantu anggota keluarganya).

Kebiasaan menabung di antara responden tergolong “sedang”, hanya 36,96% responden yang menyatakan memiliki tabungan dalam bentuk uang, baik di bank maupun di tempat lain. Rata-rata besarnya tabungan mereka hanya Rp. 50.000,-/bulan, dengan jumlah tabungan terkecil Rp. 50.000/bulan dan terbesar Rp. 500.000,-/bulan Di samping memiliki tabungan dalam bentuk uang, sebagian responden juga memiliki investasi/kekayaan berupa tanah (pekarangan, sawah, kebun, dan tambak/kolam ikan), bangunan/ rumah, barang-barang elektronik (pesawat TV dan radio/audio), barang-barang elektrik (kulkas), sepeda motor, kapal motor, dan barang-barang tahan lama lainnya (perahu). Bentuk investasi/kekayaan yang paling banyak adalah pesawat TV dan rumah.

Sebagian besar (56,52%) penduduk di lokasi penelitian mempunyai pola nafkah ganda dalam bentuk pekerjaan sambilan atau dibantu oleh anggota keluarga. Pekerjaan sambilan yang dimaksud antara lain adalah bertani (berkebun atau berladang) (23,81%), berdagang (14,29%), menjadi tukang bangunan (14,29%), menjual jasa transportasi air (kapal kelotok) (4,76%), bekerja serabutan (9,52%), menjadi tukang pijit (9,52%), menjadi tukang ojek (0,52%), dan beternak ayam (9,52%). Adapun anggota keluarga yang membantu mencari nafkah/penghasilan adalah anak (50,00%) dan anggota keluarga lainnya (50,00%).

2). Ekonomi Sumberdaya Alam

Sumberdaya alam yang ada di lokasi penelitian terutama adalah laut beserta isinya, lahan hutan, dan sungai. Menurut hasil survei sampel penguasaan dan pemilikan sumberdaya alam di Kelurahan Kariangau pada dasarnya dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah dan pribadi. Pemerintah yang dimaksud terutama adalah pemerintah Kota Balikpapan dan pribadi yang dimaksud terutama adalah penduduk. Sumber daya alam yang dikuasai oleh pemerintah umumnya adalah sumberdaya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, misalnya laut. Walau dikuasai oleh pemerintah, namun sesuai dengan sifatnya, laut terbuka bagi siapa saja (*open access*) yang bermaksud memanfaatkannya. Bagi usaha skala besar (formal) harus meminta izin kepada pemerintah, sedang bagi usaha informal (misalnya nelayan kecil) tidak diperlukan izin. Sedangkan sumberdaya alam yang boleh dikuasai dan dimiliki oleh pribadi terutama adalah lahan.

Lahan biasanya diperoleh penduduk dengan cara membuka hutan sekunder atau semak belukar termasuk bekas areal HPH. Cara lainnya adalah membeli dari pemilik pertama, dan yang lain menempati lahan milik perusahaan dimana mereka bekerja, misalnya perusahaan pengolah kayu.

Laut terutama digunakan sebagai prasarana transportasi, baik oleh penduduk setempat maupun oleh pendatang (pengusaha dan pekerja). Di samping itu laut

(termasuk pantainya) juga digunakan untuk mencari nafkah, baik oleh penduduk setempat maupun oleh pendatang (pengusaha).

Berdasarkan survei sampel diketahui bahwa status lahan yang dikuasai oleh penduduk di lokasi penelitian umumnya belum jelas/belum kuat karena tidak disertai surat bukti apapun (52,17%). Sedangkan lahan yang dikuasai oleh penduduk dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik (SHM) ada 19,57%. Proporsi terbesar ketiga adalah lahan yang dikuasai oleh penduduk dengan bukti penguasaan berupa surat dari camat yang sering disebut GS (Gambar Situasi), dan lahan milik perusahaan yang ditempati oleh para karyawannya, yakni masing-masing (10,87%).

Lahan di samping digunakan untuk mendirikan bangunan (terutama rumah tempat tinggal), juga digunakan untuk usaha/sebagai sumber nafkah. Proporsi terbesar responden (63,04%) menyatakan bahwa lahan digunakan oleh penduduk untuk berkebun. Proporsi terbesar ketiga responden (34,78%) menyatakan bahwa lahan dimanfaatkan oleh penduduk untuk berladang, dan 26,09% responden menyatakan bahwa lahan juga digunakan oleh penduduk untuk membuat tambak dan kolam ikan. Sisanya (10,87%) responden menyatakan bahwa lahan digunakan pula sebagai sawah.

Pola pemanfaatan/peruntukan lahan di Kelurahan Kariangau berdasarkan data sekunder dapat dilihat pada Tabel 1. Sedangkan status lahan menurut data sekunder yang bersumber dari Kantor Lurah dapat dilihat pada Tabel 2. Pada Tabel 1 terlihat bahwa baru sebagian kecil (20,13%) lahan di Kelurahan Kariangau yang telah dimanfaatkan, sebagian besar merupakan lahan yang belum dikelola/dimanfaatkan.

Tabel 1. Pola Peruntukan/Penggunaan Lahan di Kelurahan Kariangau

No.	Peruntukan/Penggunaan	Jumlah	Luas (ha)
1.	Jalan		16
2.	Sawah, Ladang, Tegalan, dan Perkebunan		2.567,5
3.	Bangunan Umum	23 buah	5,5
4.	Empang/Kolam/Tambak		514
5.	Pemukiman		251
6.	Kuburan		2

7.	Industri	150
8.	Perkantoran	24
9.	Lahan yang belum dikelola (termasuk hutan & rawa)	14.002,75
Jumlah		17.532,75

Sumber : Monografi Kelurahan Kariangau, Juni 2002 dan Profil Kelurahan Kariangau, Juni 2001/2002 (dimodifikasi seperlunya)

Status kepemilikan lahan pada rencana Kawasan Industri Kariangau seluas 1.603,28 hektar, sebagian besar alokasi lahan KIK tahap I berada dalam wilayah tanah negara, yang meliputi tanah negara garapan seluas 987,04 hektar dan tanah negara bebas seluas 616,24 hektar. Tanah negara garapan adalah tanah yang digunakan oleh penduduk untuk pemukiman, usaha pertanian, industri dan lainnya, termasuk bekas ladang berpindah. Sedangkan tanah negara bebas adalah tanah yang belum pernah digarap atau dikuasai oleh penduduk atau pihak tertentu, yang pada umumnya masih berupa hutan alam.

Tabel 2. Status Lahan di Kelurahan Kariangau, Tahun 2002

No.	Status	Jumlah	Luas (ha)
1.	Sertifikat Hak Milik	112 buah	174
2.	Sertifikat Hak Guna Usaha	2 buah	8
3.	Sertifikat Hak Guna Bangunan	4 buah	150
4.	Tanah Bersertifikat	120 buah	326
5.	Tanah Bersertifikat melalui Prona	102 buah	160
6.	Lainnya (tanah belum bersertifikat, tanah hak pakai dan tanah kas desa)	-	16.714,75
Jumlah			17.532,75

Sumber : Monografi Kelurahan Kariangau, Juni 2002 (dimodifikasi seperlunya)

Menurut sebagian besar (58,70%) responden laut (termasuk pantai) di sekitar lokasi penelitian terutama digunakan sebagai tempat untuk mencari nafkah (mencari ikan, menjual jasa transportasi laut, galangan kapal, dan usaha lainnya), baik oleh

penduduk setempat maupun oleh pendatang (pengusaha dan pekerja). Di samping itu menurut 23,91% responden, laut di sekitar lokasi penelitian (terutama pantainya) juga sering digunakan oleh penduduk sekitar sebagai tempat rekreasi, terutama memancing.

Sebagian besar (67,39%) responden menyatakan “tidak tahu” tentang pemanfaatan hutan di lokasi penelitian oleh penduduk setempat. Sebagian responden lainnya (23,91%) menyatakan bahwa hutan tersebut biasa digunakan oleh penduduk setempat sebagai tempat mencari kayu bakar. Sisanya (8,70%) me-nyatakan “tidak ada” hutan di wilayah Kelurahan Kariangau.

Sebagian besar (67,39%) responden menyatakan “tidak tahu” tentang pemanfaatan sungai-sungai di lokasi penelitian oleh penduduk setempat. Sebagian responden lainnya (21,74%) menyatakan bahwa sungai-sungai tersebut digunakan oleh penduduk untuk mencari nafkah (terutama menangkap ikan). Sebagian lagi responden (10,87%) menyatakan bahwa sungai-sungai tersebut juga biasa digunakan oleh penduduk untuk berekreasi, dan pemanfaatan lainnya menurut (15,22%) responden adalah sebagai prasarana transportasi.

Nilai/harga lahan di lokasi penelitian sampai saat ini masih relatif murah karena masih banyaknya tanah yang belum dimanfaatkan dan belum bersertifikat. Berdasarkan hasil survei sampel nilai/harga tanah rata-rata Rp. 7.400,-/m², dengan harga terendah Rp. 500,-/m² dan harga tertinggi Rp. 7.500,-/m².

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

- 1) Rata-rata kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat cukup tinggi, sebagian kecil mereka mempunyai tabungan, baik dalam bentuk uang maupun barang. Sebagian besar penduduk mempunyai pola nafkah ganda, seperti berkebun, berladang, tukang bangunan, jual jasa transprotasi air, bekerja serabutan,

tukang pijit, tukang ojek, dan ternak ayam. Anggota keluarga yang membantu mencari nafkah adalah anak dan anggota keluarga lainnya.

- 2) Status lahan yang dikuasai penduduk pada umumnya tidak disertai surat bukti apapun, tetapi ada juga sebagian kecil yang sudah memiliki sertifikat hak milik dan gambar situasi (GS) dari camat. Pola pemanfaatan sumberdaya alam adalah untuk mendirikan rumah, sebagai sarana transportasi dan sumber mencari nafkah.
- 3) Lahan pada rencana Kawasan Industri Kariangau seluas 1.603,28 Ha yang terdiri dari tanah negara garapan seluas 987,04 Ha dan tanah negara bebas 616,24 Ha

4.2. Saran-saran

- 1) Rencana kegiatan pembangunan Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Kecamatan Balikpapan Barat, selain berdampak positif juga akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup sekitarnya termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu dalam penanganan dampak akan lebih tepat bila dilakukan terhadap sumber-sumber penyebab timbulnya dampak, seperti pada saat pembebasan lahan, rekrutman tenaga kerja, dan tingkah laku karyawan/buruh pendatang.
- 2) Kegiatan pembebasan lahan untuk KIK seluas 1.500 Ha diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif terhadap matapencaharian dan pendapatan penduduk yang terkena pembebasan lahan, untuk itu disarankan dalam proses pembebasan lahan perlu dilakukan musyawarah antara pihak pengusaha, pemerintah dan masyarakat sekitarnya guna memperoleh kesepakatan bersama.
- 3) Rencana kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak terhadap air sungai yang ada di sekitar KIK dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak lanjutan terhadap kehidupan nelayan, untuk itu perlu adanya pembinaan masyarakat ke arah profesi alternatif sejak dini, sehingga pada saat dampak negatif muncul

masyarakat sudah siap untuk alih profesi yang dapat menopang kelangsungan hidupnya.

- 4) Dalam proses penerimaan karyawan/buruh, hendaknya lebih memprioritaskan pada masyarakat setempat selama memenuhi spesifikasi keahlian yang dipersyaratkan, sehingga diharapkan tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.
- 5) Pengusaha perlu menumbuhkan peran serta masyarakat pada kegiatan perdagangan, jasa angkutan, dan memberikan bantuan sosial, serta menindak tegas terhadap karyawan/buruh yang melakukan pelanggaran terhadap norma yang berlaku di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2000. Analisa Data Pokok untuk Pembangunan Wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur, Samarinda.
- Anonim. 2000. *Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan AMDAL Hak Pengusahaan Hutan Tanaman*. Komdal Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta.
- Lembaga Demografi. ----. *Dasar-dasar Demografi*. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Poedjawijatna, 1987. *Manusia dengan Alamnya*. Bina Aksara, Jakarta.
- Sajogyo 1982. *Bunga Rampai Perekonomiaan Desa*. Yayasan Agro-ekonomi, IPB, Bogor.
- Sajogyo 1977. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. LPSP-IPB, Bogor.
- Sajogyo 1989. *Sosiologi Pedesaan*. Penerbit UGM, Yogyakarta.
- Soemarwoto, O. 1989. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. UGM-Press, Yogyakarta.
- Soetrisno Loekman dan Retno Winahyu.1991. *Kelapa Sawit, Kajian Sosial Ekonomi*. Aditya Media, Yogyakarta.
- Tjitrajaya, I & A.P. Vayda. 1990. *Mangkaji Hubungan Timbal Balik antara Prilaku Manusia dan Lingkungan*. LIPI, Jakarta.

Wirosuhardjo, K. 1991. Dasar-Dasar Demografi. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.